

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

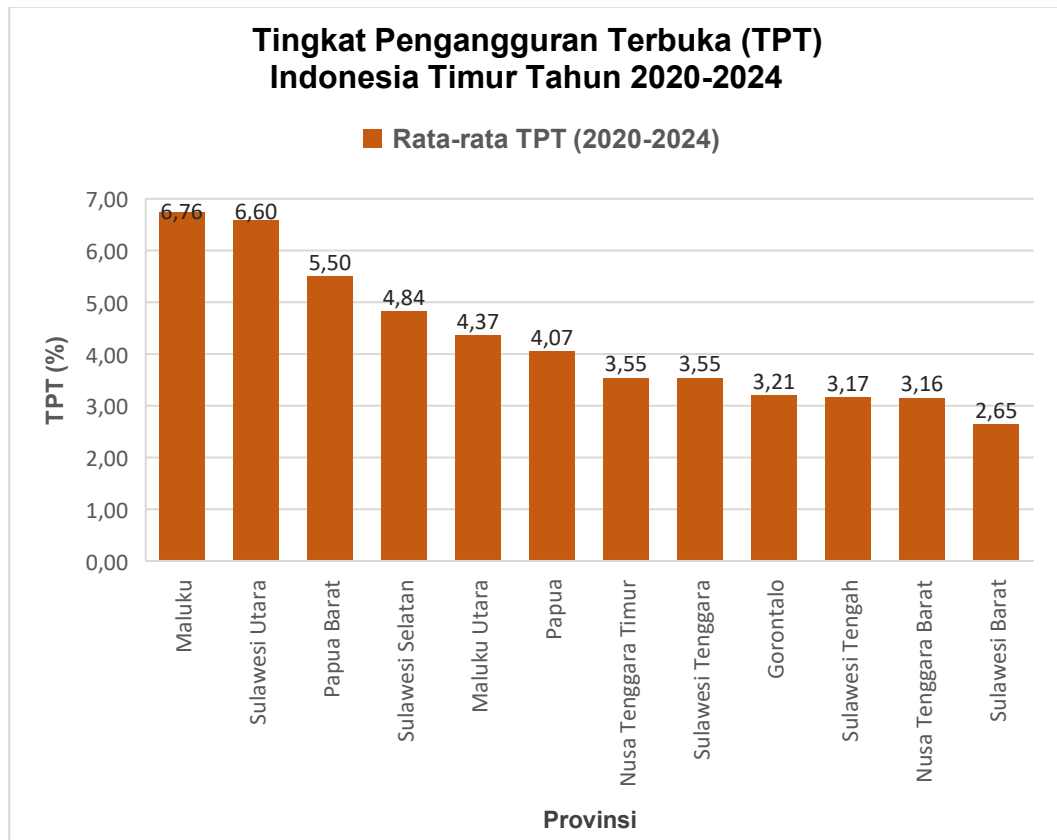
Pembangunan ekonomi regional merupakan salah satu pilar penting dalam mempercepat pertumbuhan nasional, khususnya di negara berkembang. Teori keunggulan kompetitif (Porter, 1990) dan konsentrasi sektor basis (Krugman, 1991) menegaskan bahwa identifikasi sektor unggulan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Di Asia Tenggara, Bank Dunia (2022) mencatat bahwa sekitar 60% pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) disumbang oleh sektor manufaktur dan perdagangan. Meski demikian, disparitas antarsektor dan antarwilayah masih menjadi tantangan utama, sebagaimana terjadi di Indonesia dan Filipina, di mana urbanisasi turut memperlebar kesenjangan ekonomi (ADB, 2021).

Secara nasional, Indonesia menghadapi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah. Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional menurun dari 13% pada 2010 menjadi 9% pada 2022, sementara sektor industri meningkat dari 23% menjadi 28%. Namun, keterganungan terhadap sektor primer seperti pertaniandan perikanan masih sangat tinggi di wilayah timur Indonesia, khususnya Provinsi Maluku. Analisis LQ menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor basis di provinsi ini, dengan nilai $LQ > 1$, menunjukkan potensi besar untuk pengembangan lebih lanjut. Salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi daerah adalah tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tidak sebanding dengan pertumbuhan sektor ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020–2024, Provinsi Maluku mencatat rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di kawasan Indonesia Timur, yaitu sebesar 6,76%. Posisi selanjutnya ditempati oleh Provinsi Sulawesi Utara sebesar 6,60%, dan Papua Barat sebesar 5,50%. Sebaliknya, Provinsi dengan rata-rata TPT terendah dalam periode yang sama adalah Sulawesi Barat, yakni sebesar 2,65%. Tingginya TPT di Maluku secara nominal menunjukkan kondisi yang tidak baik dibandingkan wilayah lain di timur Indonesia. Namun, angka ini belum sepenuhnya mencerminkan asi penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor unggulan provinsi tersebut.



Untuk memberikan gambaran komparatif mengenai kondisi ketenagakerjaan di Indonesia Timur, dapat dilihat pada grafik rata-rata TPT tahun 2020-2024, sebagai berikut:

Gambar 1. Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2020-2024 di Indonesia Timur



Sumber: BPS, 2020-2024

Sebagai upaya mengidentifikasi sektor unggulan, metode *Location Quotient* (LQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) digunakan untuk mengukur kekuatan relatif suatu sektor dibandingkan rata-rata nasional. Sektor dengan nilai $LQ > 1$ diidentifikasi sebagai sektor basis yang berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi. Selain itu, analisis regresi linier digunakan untuk mengukur pengaruh sektor unggulan terhadap variabel ekonomi lain, seperti PDRB dan TPT. Studi Bandara (2024) di West Virginia menggunakan pendekatan LQ dan DLQ yang dilanjutkan dengan regresi linier panel menyimpulkan bahwa sektor basis memang secara signifikan mendorong pertumbuhan PDRB dan penyerapan tenaga kerja.



meskipun sektor unggulan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, namun upaya terhadap penurunan TPT masih menghadapi berbagai hambatan.

Meskipun sektor pertanian dan perikanan di Maluku merupakan sektor basis, kontribusinya terhadap penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan keterampilan tenaga kerja lokal dan dominasi tenaga kerja dari luar daerah. Penelitian oleh Manuhutu (2011) menunjukkan bahwa sektor perikanan di Provinsi Maluku memiliki potensi ekonomi yang besar, namun belum mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal. Selain itu, Tutupoho (2019) mengidentifikasi bahwa sektor basis di Provinsi Maluku belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat memengaruhi tingkat pengangguran. Kondisi ini mencerminkan perlunya strategi pembangunan yang fokus pada peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal dan optimalisasi sektor unggulan untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka di daerah tersebut.

Heterogenitas ekonomi antarkabupaten di Maluku juga menjadi perhatian. Data BPS (2024) menunjukkan bahwa Kota Ambon mendominasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi melalui sektor perdagangan dan jasa, sementara kabupaten lain seperti Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat masih mengandalkan sektor primer. Namun, potensi sektor kelautan dan perikanan yang besar belum optimal dimanfaatkan, meskipun provinsi ini memiliki garis pantai yang luas dan sumber daya laut yang melimpah.

Kesenjangan keterampilan juga menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi sektor basis. Laporan World Bank (2022) menunjukkan bahwa 40% perusahaan di sektor basis mengeluhkan minimnya tenaga kerja terampil. Di Maluku, data BPS (2024) mencatat bahwa sekitar 68,41% angkatan kerja bekerja pada kegiatan informal, yang mencerminkan rendahnya tingkat kepemilikan sertifikat kompetensi di kalangan tenaga kerja. Kondisi ini masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 35%. Kebijakan fiskal dan regulasi memiliki peran strategis dalam memperkuat sektor basis. Studi ADB (2021) mencontohkan keberhasilan Thailand dalam mengembangkan sektor otomotif melalui insentif pajak dan pelatihan vokasi. Sebaliknya, Dana Alokasi Umum (DAU) di Indonesia yang dipergunakan untuk pengembangan sektor unggulan masih rendah dan tidak efektif (Simatupang, 2020).

Fenomena seperti di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang mengandalkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sektor . Namun, sektor ini belum mampu menyerap tenaga kerja lokal secara yang mengindikasikan adanya *economic leakage*. Hal ini disebabkan oleh



keterbatasan keterampilan tenaga kerja lokal dan dominasi tenaga kerja dari luar daerah. Madaul dkk. (2023) mencatat bahwa masyarakat pesisir di Kecamatan Werinama, SBT, menghadapi tantangan dalam mempertahankan mata pencaharian mereka akibat perubahan iklim dan keterbatasan akses terhadap pelatihan keterampilan. Selain itu, Wokanubun dan Masyhuri (2008) mengidentifikasi bahwa sektor pertanian di SBT memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian, namun masih menghadapi kendala dalam hal produktivitas dan efisiensi. Kondisi ini mencerminkan perlunya strategi pembangunan yang fokus pada peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal dan optimalisasi sektor unggulan untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka di daerah tersebut.

Perkembangan metodologi analisis sektor basis kini mulai memanfaatkan pendekatan spasial dan *big data*. Studi LeSage dan Pace (2009) mengembangkan model ekonometrik spasial untuk mengukur efek *spillover* antarwilayah, sementara Rambe dan Nuryartono (2023) memanfaatkan integrasi LQ dan *input-output* untuk memetakan keterkaitan sektoral. Pandemi COVID-19 turut mempercepat pergeseran struktur ekonomi. OECD (2023) melaporkan penurunan 15% kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB negara berkembang. BPS (2024) melaporkan bahwa struktur ekonomi di Provinsi Maluku masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi 23,56% terhadap PDRB, di mana subsektor perikanan menyumbang 13,30%. Meskipun menjadi sektor basis dengan potensi besar, namun pemanfaatannya belum optimal. Sementara itu, sektor transportasi dan pergudangan (-4,91%) serta akomodasi dan makan minum (-7,63%) menunjukkan perlambatan akibat pemulihan pascapandemi yang belum merata. Sebaliknya, sektor pertanian tetap tumbuh 2,5%, menandakan ketahanan terhadap guncangan eksternal.

Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis komparatif sektor unggulan di Provinsi Maluku selama periode 2020–2024, serta mengkaji dampaknya terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pemilihan topik ini dilatarbelakangi oleh tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Maluku, yang tidak sejalan dengan pertumbuhan sektor ekonomi yang justru menunjukkan peningkatan signifikan. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini juga mampu memberikan manfaat nyata berupa perluasan lapangan kerja bagi masyarakat lokal melalui penurunan TPT. Dengan



memahami pola keterkaitan antara sektor unggulan dan TPT, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi berbasis data bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diangkat, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa saja sektor yang unggul dalam perekonomian Provinsi Maluku?
2. Apakah sektor-sektor tersebut berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Maluku?
3. Apakah Pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Maluku?
4. Apakah persentase penduduk miskin berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Maluku?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja sektor yang unggul dalam perekonomian Provinsi Maluku.
2. Untuk mengetahui pengaruh sektor-sektor unggulan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Maluku.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Maluku?
4. Untuk mengetahui pengaruh persentase penduduk miskin terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Maluku?

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian terdiri manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang ekonomi pembangunan, khususnya terkait analisis sektor unggulan dan keterkaitannya dengan ketenagakerjaan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa di wilayah Maluku maupun daerah lain dengan karakteristik ekonomi yang sebanding.



2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi:

- a. Pemerintah Provinsi Maluku, sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang berbasis potensi lokal. Optimalisasi sektor unggulan diharapkan mampu mendorong penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara lebih strategis dan berkelanjutan.
- b. Masyarakat, khususnya pelaku ekonomi, dalam memperoleh informasi yang relevan mengenai sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Dengan demikian, masyarakat dapat menentukan bidang usaha atau pekerjaan secara lebih rasional dan terarah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.4 Landasan Teori

2.4.3 Teori Basis Ekonomi

Sektor basis merupakan sektor yang menjadi tulang punggung dalam pembangunan ekonomi daerah karena memiliki keunggulan kompetitif yang relatif tinggi dalam menghasilkan output yang dapat diekspor ke luar wilayahnya, sehingga mampu menciptakan aliran pendapatan masuk ke dalam perekonomian daerah (Partridge dan Rickman, 2005). Sebaliknya, sektor non-basis merupakan sektor yang sebagian besar melayani kebutuhan lokal dan berfungsi sebagai sektor pendukung atau penunjang bagi sektor basis, yang umumnya termasuk dalam kategori industri jasa (Richardson, 1978; Blakely & Leigh, 2013).

Teori basis ekonomi menjelaskan bahwa sektor-sektor yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan dari luar daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Aktivitas ekspor yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal, seperti tenaga kerja dan bahan baku, tidak hanya menciptakan aliran pendapatan masuk ke wilayah tersebut, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Partridge dkk. (2017) menemukan bahwa daerah dengan konsentrasi pada sektor-sektor ekspor menunjukkan peningkatan tingkat pekerjaan dan penurunan kemiskinan, terutama di wilayah non-metropolitan. Namun demikian, penelitian tersebut juga menekankan bahwa guncangan ekonomi domestik tetap menjadi faktor dominan dalam menentukan variasi pertumbuhan ekonomi antarwilayah.

Teori ekonomi basis menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh besarnya aliran pendapatan yang berasal dari luar wilayah tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan arus pendapatan eksternal adalah melalui kegiatan ekspor. Ekspor dianggap sebagai penggerak utama atau mesin pertumbuhan ekonomi daerah karena tidak hanya memberikan pemasukan langsung, tetapi juga menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*), yakni peningkatan pendapatan masyarakat dan



dan kesempatan kerja akibat perputaran kembali pendapatan di dalam ekonomi lokal (Moretti, 2012). Dalam konteks ini, peningkatan aktivitas ekspor dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan nilai

tambah, peningkatan permintaan terhadap faktor produksi lokal, serta penguatan struktur ekonomi wilayah (Faggio & Overman, 2014).

2.4.4 Teori Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja dalam ekonomi merupakan permintaan turunan (*derived demand*), yaitu permintaan terhadap tenaga kerja yang bergantung pada permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut. Dengan kata lain, perusahaan akan mempekerjakan tenaga kerja jika terdapat permintaan terhadap output yang dihasilkan. Konsep ini menjelaskan bahwa permintaan terhadap tenaga kerja tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh permintaan terhadap produk akhir (Ehrenberg & Smith, 2015).

Dalam teori ekonomi mikro, perusahaan akan mempekerjakan tenaga kerja hingga nilai produk marjinal tenaga kerja (*Value of Marginal Product of Labor*, VMPL) sama dengan tingkat upah yang dibayarkan. VMPL diperoleh dari hasil perkalian antara produk fisik marjinal (*Marginal Physical Product*, MPP) dengan harga produk yang dihasilkan. Ketika VMPL lebih besar dari upah, perusahaan memperoleh keuntungan tambahan dari setiap pekerja tambahan, sehingga akan terus menambah tenaga kerja hingga VMPL sama dengan upah (Pindyck & Rubinfeld, 2017).

Kurva permintaan tenaga kerja memiliki kemiringan negatif, yang mencerminkan hubungan terbalik antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang diminta. Artinya, semakin tinggi tingkat upah, semakin sedikit tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan, dan sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh hukum hasil marjinal yang menurun, di mana penambahan satu unit tenaga kerja akan menghasilkan tambahan output yang semakin kecil jika faktor produksi lainnya tetap (Pindyck & Rubinfeld, 2017; Varian, 2014).

2.4.5 Teori Sektor Unggulan

Penentuan sektor unggulan merupakan salah satu pendekatan penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah, karena mampu menunjukkan sektor-sektor prioritas yang memiliki keunggulan komparatif. Salah satu metode yang digunakan adalah *Location Quotient* (LQ), yaitu teknik analisis kuantitatif untuk membandingkan kontribusi suatu sektor di tingkat daerah dengan kontribusi sektor yang sama di tingkat nasional. Nilai $LQ > 1$ menunjukkan bahwa sektor memiliki keunggulan komparatif dan tergolong sebagai sektor basis atau unggulan, karena perannya lebih dominan dibanding rata-rata nasional (dkk., 2020).



Metode LQ hanya memberikan gambaran statis dalam satu periode tertentu. Oleh karena itu, untuk melengkapi analisis LQ digunakan pendekatan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) yang memperhitungkan perubahan nilai LQ dari waktu ke waktu guna menangkap dinamika pertumbuhan sektor. Nilai DLQ > 1 mengindikasikan bahwa sektor tersebut tidak hanya memiliki kontribusi besar secara struktural, tetapi juga menunjukkan kecenderungan pertumbuhan positif dan berkelanjutan dalam jangka panjang (Dewi & Kartika, 2019). Kombinasi antara LQ dan DLQ memberikan informasi yang lebih komprehensif dalam mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang strategis untuk pengembangan ekonomi daerah.

2.5 Konsep Pembangunan Daerah

Pembangunan ekonomi daerah didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan terstruktur yang melibatkan pemerintah daerah beserta masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal serta membangun kolaborasi sistematis antara pihak pemerintahan dan pelaku usaha swasta. Tujuan utama dari interaksi multidimensi ini adalah untuk mengembangkan kesempatan kerja yang berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut melalui sinergi kebijakan publik dan inisiatif bisnis (Bellanova, 2017).

Perencanaan pembangunan daerah adalah usaha sistematis untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya publik dan memperkuat kapasitas sektor swasta dalam pengelolaan aset privat secara akuntabel (Allmendinger & Haughton, 2019). Fase awal proses perencanaan melibatkan identifikasi peran masing-masing pemangku kepentingan dalam struktur pembangunan ekonomi (Bellanova, 2017).

2.6 Konsep Ketenagakerjaan

Tenaga kerja menurut UU No.13 tahun 2003 adalah setiap orang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Berdasarkan UU No. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan yang di tetapkan tanggal 2 Oktober 1998 telah ditentukan bahwa batasan minimal usia seorang tenaga kerja di Indonesia adalah 10 tahun atau lebih. Namun, Indonesia tidak menganut batasan maksimal usia kerja karena Indonesia belum mempunyai jaminan sosial yang memadai.



2.7 Konsep Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor demografis yang memiliki implikasi penting terhadap pembangunan ekonomi suatu daerah atau negara. Teori klasik tentang pertumbuhan penduduk pertama kali dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus dalam karyanya *An Essay on the Principle of Population* (1798), yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung bersifat eksponensial, sementara pertumbuhan produksi pangan bersifat linier. Ketimpangan ini, menurut Malthus, akan menyebabkan kelangkaan sumber daya dan menimbulkan tekanan ekonomi, kecuali dikendalikan oleh faktor-faktor pembatas seperti bencana, kelaparan, dan penyakit (Cohen, 2003).

Pandangan Malthus dianggap terlalu pesimis oleh banyak ekonom modern. Teori transisi demografi yang lebih kontemporer menunjukkan bahwa seiring peningkatan pembangunan dan pendidikan, terutama di kalangan perempuan, angka kelahiran cenderung menurun (Kirk, 1996). Dalam konteks ekonomi, pertumbuhan penduduk dapat memberikan dampak ganda. Di satu sisi, peningkatan jumlah penduduk dapat memperbesar pasokan tenaga kerja dan mendorong permintaan agregat, sehingga menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, jika pertumbuhan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur, maka akan menyebabkan beban ekonomi yang besar dan memperburuk tingkat pengangguran (Hanushek & Woessmann, 2020).

Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat dapat membebani pertumbuhan PDB per kapita, terutama apabila produktivitas tenaga kerja dan kapasitas produksi tidak ikut meningkat. Oleh karena itu, pengendalian pertumbuhan penduduk serta peningkatan produktivitas tenaga kerja merupakan strategi penting dalam pembangunan berkelanjutan (Bloom, dkk., 2019).

2.8 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik dari aspek pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan sesuai standar hidup minimum yang berlaku. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, serta kesempatan kerja yang layak, sehingga sering kali menciptakan setan kemiskinan yang sulit diputus (Suparman dkk., 2024). Secara al, kemiskinan bersifat multidimensi, meliputi dimensi ekonomi berupa a pendapatan dan konsumsi, dimensi sosial yang ditandai dengan



terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta ketenagakerjaan, dan dimensi kerentanan yang terkait dengan ketidakamanan pekerjaan serta risiko kehilangan pendapatan. Hubungan antara kemiskinan dan pengangguran bersifat timbal balik, di mana rendahnya tingkat keterampilan dan pendidikan menyebabkan kelompok miskin cenderung bekerja di sektor informal dengan produktivitas dan pendapatan rendah. Hal ini konsisten dengan teori dualisme pasar tenaga kerja yang menjelaskan bahwa pekerja miskin sering kali terperangkap di sektor informal tanpa jaminan sosial maupun peningkatan keterampilan yang memadai (Al-Jundi dkk., 2020). Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya menjadi indikator keterbatasan ekonomi, tetapi juga mencerminkan hambatan struktural yang memperburuk kesenjangan sosial dan membatasi partisipasi produktif kelompok miskin dalam perekonomian formal.

2.9 Konsep Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan mekanisme kolaboratif antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya lokal. Proses ini melibatkan sinergi strategis dengan sektor swasta untuk memperluas kesempatan kerja serta mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah terkait (Rodríguez Pose & Ezcurra, 2011).

Menurut Subandi (2016), tujuan utama pembangunan ekonomi daerah adalah memperluas variasi dan kuantitas lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Pencapaian tujuan ini memerlukan sinergi partisipatif antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menginisiasi program pembangunan. Untuk itu, kedua pihak perlu mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya daerah secara maksimal. Setiap potensi sumber daya, baik fisik maupun non-fisik, harus dikelola secara strategis sebagai fondasi dalam merancang dan menguatkan struktur perekonomian daerah.

Ada empat peran menurut Subandi (2016) yang diambil oleh pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu:

1. *Entrepreneur*

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis di daerahnya. Pemerintah daerah dapat mengembangkan suatu usaha sendiri atau membentuk BUMD atau bermitra dengan usaha swasta namun tetap usahanya tetap dalam pengendalian pemerintah daerah. Pemerintah



daerah harus dapat mengelola aset-asetnya dengan lebih baik sehingga secara ekonomis dapat memberikan keuntungan.

2. Koordinator

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator, melalui penetapan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan ekonomi daerahnya. Pemerintah dapat melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya dalam proses penyusunan sasaran-sasaran ekonomi, rencana-rencana dan strategi pelaksanaannya.

3. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta mengatur penetapan daerah yang lebih baik.

4. Simulator

Pemerintah daerah dapat berperan sebagai stimulan dalam penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus. Hal ini dapat mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut serta menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada sebelumnya tetap berada di daerah tersebut dan tetap eksis.

2.10 Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan pada data PDRB, baik atas harga berlaku maupun atas harga konstan. Di mana PDRB harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi karena tidak dipengaruhi oleh perubahan harga sedangkan PDRB atas harga berlaku digunakan untuk melihat besar dan struktur ekonomi suatu daerah. Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan metode yaitu langsung dan tidak langsung (alokasi).

Pendekatan Produksi (*Production Approach*) dalam perhitungan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) dilaksanakan melalui kalkulasi nilai akhir barang yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah selama satu tahun. Metode ini dikenal pula sebagai pendekatan nilai tambah



(*value added*), di mana perhitungannya berfokus pada akumulasi nilai tambah yang diciptakan oleh setiap aktivitas ekonomi, sektor, atau subsektor. Nilai tambah didefinisikan sebagai selisih antara nilai produksi (output) dan biaya antara (*intermediate consumption*), yang mencakup input berupa barang/jasa yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku atau energi yang habis dalam satu siklus produksi atau memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun (IMF, 2017; StatsCan, 2024).

Pendekatan Pendapatan merepresentasikan total remunerasi faktor produksi (upah, sewa, bunga, laba) yang menjadi dasar distribusi pendapatan dalam ekonomi makro (Mankiw, 2014). Secara teoretis, triadik pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran bersifat konvergen karena merefleksikan prinsip circular flow of income, di mana output total suatu ekonomi harus setara dengan pendapatan total dan pengeluaran agregat (Samuelson & Nordhaus, 2010).

Meskipun ketiga pendekatan (produksi, pendapatan, dan pengeluaran) memiliki metodologi berbeda, secara teoretis, hasil perhitungannya akan konvergen. Hal ini merefleksikan prinsip keseimbangan dalam sistem ekonomi, di mana total pengeluaran (*aggregate expenditure*) harus setara dengan total nilai output akhir (final goods and services) dan total pendapatan faktor produksi (*factor income*). PDRB yang dihitung melalui pendekatan ini disebut PDRB atas dasar harga pasar, karena mencakup komponen pajak tidak langsung neto (*net indirect taxes*).

2.11 Konsep Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian ketenagakerjaan yang merujuk pada tersedianya lapangan pekerjaan yang dapat diisi oleh angkatan kerja sesuai dengan keterampilan, pendidikan, dan minat mereka. Dalam perspektif ekonomi makro, kesempatan kerja diartikan sebagai kondisi di mana seluruh angkatan kerja yang bersedia dan mampu bekerja pada tingkat upah tertentu dapat memperoleh pekerjaan (Sukirno, 2015). Dengan demikian, kesempatan kerja tidak hanya berkaitan dengan jumlah pekerjaan yang tersedia, tetapi juga mencakup aspek kesesuaian antara karakteristik tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja.



urut teori dualisme pasar tenaga kerja, kesempatan kerja dapat menjadi dua segmen yaitu sektor formal dan informal. Di negara ang, sektor formal biasanya menyediakan kesempatan kerja yang lebih

produktif, stabil, dan bergaji tetap, sedangkan sektor informal cenderung menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal akibat keterbatasan keterampilan atau rendahnya permintaan tenaga kerja (De Mel, dkk., 2013).

Studi oleh World Bank (2022) mengidentifikasi bahwa penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas menjadi tantangan di kawasan Asia Tenggara, di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan jumlah dan mutu kesempatan kerja. Hal ini disebabkan oleh ketimpangan sektor basis yang cenderung padat modal dan kurang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dalam konteks Indonesia, meskipun terdapat kecenderungan transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, sebagian besar tenaga kerja di wilayah pedesaan masih terserap di sektor pertanian subsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor non-pertanian belum sepenuhnya mampu menyerap kelebihan tenaga kerja dari sektor pertanian, sehingga transformasi tenaga kerja berjalan secara lambat dan tidak merata (Ardiansyah dkk., 2020)

Selain faktor struktural, kesempatan kerja juga dipengaruhi oleh dinamika regional dan kebijakan pemerintah. Esteban dkk., (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa disparitas antardaerah dalam hal infrastruktur, pendidikan, dan akses terhadap teknologi turut menentukan distribusi kesempatan kerja di suatu wilayah. Oleh karena itu, pengembangan sektor unggulan berbasis potensi daerah diharapkan tidak hanya meningkatkan PDRB, tetapi juga memperluas kesempatan kerja lokal yang sejalan dengan karakteristik angkatan kerja setempat. Dalam konteks Maluku, integrasi antara pengembangan sektor basis dan pelatihan tenaga kerja menjadi kunci untuk mendorong kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan.

2.12 Variabel kontrol

Dalam penelitian kuantitatif, variabel kontrol merupakan variabel yang dijaga konstan atau dikendalikan agar tidak memengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Kehadiran variabel kontrol sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan yang diamati pada variabel terikat benar-benar disebabkan oleh variabel bebas, bukan oleh faktor luar lainnya. Menurut Hünermund dan Louw, (2023) variabel kontrol digunakan dalam analisis regresi untuk mengidentifikasi efek kausal antara variabel independen dan dependen dengan mengendalikan pengaruh variabel luar yang dapat menyebabkan bias. Mereka menegaskan bahwa variabel kontrol sering kali bersifat endogen



dan dapat merepresentasikan berbagai mekanisme kausal secara simultan, sehingga interpretasi atas koefisiennya dapat menyesatkan. Oleh karena itu, penggunaan variabel kontrol sebaiknya difokuskan untuk meningkatkan validitas internal, bukan untuk penarikan kesimpulan kausal dari variabel tersebut.

Dalam studi ekonomi regional, variabel kontrol sering digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi tingkat pengangguran terbuka, seperti tingkat pendidikan, jumlah penduduk, atau investasi. Menurut Badan Pusat Statistik (2023), faktor demografi dan sosial ekonomi seperti tingkat urbanisasi, partisipasi angkatan kerja, serta migrasi tenaga kerja berperan penting dalam menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja suatu daerah. Hal ini diperkuat oleh penelitian Nugroho dkk. (2021) menyatakan bahwa selain kontribusi sektor unggulan, faktor pendidikan dan infrastruktur memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di wilayah Indonesia timur.

Penelitian Wahyuni dkk. (2022) dalam *Economic Development Quarterly* juga menegaskan bahwa ketidakterlibatan variabel kontrol dapat menyebabkan distorsi dalam interpretasi hasil penelitian. Mereka menemukan bahwa tanpa mengendalikan faktor pendidikan dan investasi, kontribusi sektor basis terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan cenderung dilebih-lebihkan. Oleh karena itu, keberadaan variabel kontrol dalam penelitian menjadi elemen penting untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif dan proporsional mengenai pengaruh variabel utama terhadap tenaga kerja.

Esteban dkk. (2018) menjelaskan bahwa dalam metode *Shift-Share Analysis*, penambahan variabel kontrol dapat memperbaiki akurasi analisis komparatif antarwilayah. Dengan mempertimbangkan faktor kontrol seperti tingkat produktivitas sektor, kebijakan upah minimum, dan kondisi pasar tenaga kerja lokal, penelitian dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif dan dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan ekonomi daerah yang tepat sasaran. Oleh karena itu, dalam penelitian tentang sektor unggulan dan dampaknya terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Maluku, penggunaan variabel kontrol menjadi hal yang esensial untuk menghindari bias dan menghasilkan rekomendasi yang relevan.



di Empiris

hairiyakh dkk. (2015) melakukan analisis sektor basis perekonomian Jambi menggunakan pendekatan *Location Quotient* (LQ) dan *Dynamic*

Location Quotient (DLQ). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah serta sektor-sektor yang berpotensi berkembang di masa depan. Data yang digunakan merupakan *time series* Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian dan subsektornya konsisten menjadi sektor basis di Provinsi Jambi, dengan kontribusi signifikan terhadap struktur ekonomi regional. Analisis DLQ mengonfirmasi bahwa sektor ini tidak hanya unggul secara statis, tetapi juga memiliki potensi pertumbuhan positif di masa mendatang.

Ramoni Perazzi dan Orlandoni Merli (2019) menganalisis elastisitas penyerapan tenaga kerja berdasarkan sektor dan wilayah di Kolombia. Penelitian ini menggunakan data *panel* sektoral dan regional untuk menghitung *labor elasticity of growth* yang merepresentasikan seberapa besar peningkatan output sektor dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja. Hasilnya menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki elastisitas sekitar 0,89, lebih rendah dibanding sektor manufaktur (2,39) dan jasa (1,14). Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan output di sektor pertanian tidak selalu sejalan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja, karena adanya mekanisasi dan peningkatan produktivitas yang menggantikan tenaga kerja manusia.

Pangesti dan Prawoto (2018) meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Dengan menggunakan metode regresi linier berganda dan data *time series*, penelitian ini membagi analisis per sektor ekonomi, termasuk sektor perdagangan. Hasilnya menunjukkan bahwa PDRB sektor perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, menandakan bahwa pertumbuhan sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, baik di sektor formal maupun informal.

Wahyu dan Triani (2023) menganalisis pengaruh jumlah hotel terhadap penyerapan tenaga kerja di sembilan destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat. Menggunakan analisis regresi, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pengembangan infrastruktur akomodasi dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kesempatan kerja

berbasis pariwisata.

usari dkk. (2022) meneliti hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pengangguran di Indonesia dengan pendekatan ekonometrika. Studi ini



menemukan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran melalui jalur peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, terutama ketika proporsi penduduk usia produktif tinggi (bonus demografi) dimanfaatkan secara optimal.

Sibagariang dkk. (2022) meneliti keterkaitan antara kemiskinan dan dominasi sektor informal di Indonesia menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase kemiskinan berhubungan positif dan signifikan dengan tingginya proporsi pekerja di sektor informal. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok miskin cenderung bekerja pada sektor dengan upah rendah, jam kerja fleksibel, dan tanpa perlindungan formal.

Penelitian oleh Bandara (2024) mengkaji dinamika ketenagakerjaan regional di negara bagian West Virginia, Amerika Serikat, dengan menggunakan pendekatan gabungan antara *Location Quotient* (LQ) dan analisis *shift-share* terhadap data panel periode 2001–2020. Studi ini mengidentifikasi sektor-sektor basis dan menguraikan komponen pertumbuhan ketenagakerjaan meliputi struktur industri nasional (SGE), struktur industri regional (IME), dan efek kompetitif (CE) di lima wilayah utama West Virginia. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun secara agregat terjadi penurunan jumlah pekerjaan, beberapa sektor seperti layanan kesehatan, akomodasi, dan jasa profesional menunjukkan pertumbuhan positif di wilayah tertentu. Nilai LQ yang signifikan di sektor pertambangan dan manufaktur di *Mid-Ohio Valley* serta sektor *utilitas* dan perdagangan grosir di *Metro Valley* menunjukkan keberadaan sektor basis yang berbeda antarwilayah. Studi ini menegaskan pentingnya analisis spasial dan sektoral dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan berbasis potensi regional, serta memperkuat penggunaan LQ dan *shift-share* sebagai instrumen dalam memahami struktur ekonomi daerah secara lebih mendalam.

Penelitian empiris oleh Novianto dan Marsisno (2019) mengkaji konvergensi spasial produktivitas tenaga kerja sektoral antarprovinsi di Indonesia pada periode 2010-2016 dengan menggunakan model data panel dinamis dan pendekatan *Spatially Corrected Blundell-Bond* (SCBB). Hasil penelitian menunjukkan adanya konvergensi produktivitas di seluruh sektor, dengan n tertinggi pada sektor sekunder (*half-life* 1-2 tahun), diikuti sektor tersier n), dan sektor primer (± 10 tahun). Variabel *gross fixed capital formation* rata-rata lama sekolah (MYS), dan upah riil (RW) berpengaruh positif



terhadap produktivitas tenaga kerja, sedangkan angka harapan hidup (LE) menunjukkan pengaruh negatif. Efek spasial juga terbukti signifikan, mencerminkan adanya interaksi regional dalam dinamika produktivitas antarwilayah. Temuan ini menekankan pentingnya penguatan investasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendorong pertumbuhan produktivitas, khususnya di sektor dan wilayah yang masih tertinggal.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khairiyakh et al. (2015) menganalisis sektor unggulan di Provinsi Jambi dengan menggunakan metode Location Quotient (LQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ) berbasis data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) *time series*. Studi ini bertujuan untuk mengklasifikasikan sektor basis dan sektor potensial yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah sekaligus prospek pertumbuhan yang baik di masa depan. Hasilnya menunjukkan bahwa sektor pertanian dan subsektornya konsisten menjadi sektor basis di berbagai wilayah, memperkuat posisinya dalam struktur ekonomi regional. Relevansi penelitian ini terhadap studi yang dilakukan terletak pada penggunaan metode LQ-DLQ sebagai instrumen identifikasi sektor unggulan. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada pemetaan sektor dan belum menguji hubungan kuantitatifnya dengan indikator ketenagakerjaan seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang menjadi fokus utama penelitian ini.
2. Ramoni Perazzi dan Orlandoni Merli (2019) melakukan studi di Kolombia untuk mengukur elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan output pada berbagai sektor ekonomi. Dengan menggunakan model panel data lintas departemen, penelitian ini menghitung *employment elasticity* masing-masing sektor dan menemukan bahwa sektor pertanian memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja yang lebih rendah ($\sim 0,89$) dibandingkan sektor manufaktur (2,39) dan jasa (1,14). Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor lain yang lebih produktif, sejalan dengan pola transformasi struktural di negara berkembang. Relevansi studi ini terhadap penelitian ini terletak pada kesamaan fokus pada sektor pertanian, meskipun konteksnya berbeda: penelitian ini mengkaji hubungan PDRB pertanian dengan TPT di Maluku, sedangkan Ramoni Perazzi & Merli mengkaji elastisitas tenaga kerja lintas sektor di Kolombia.
3. Penelitian Pangesti dan Prawoto (2018) menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi sektoral terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur



dengan menggunakan model regresi linier berganda berbasis data *time series*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor perdagangan memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, baik pada skala formal maupun informal. Penelitian ini relevan dengan fokus penelitian ini karena sama-sama menyoroti peran sektor perdagangan dalam dinamika ketenagakerjaan. Perbedaan terletak pada variabel dependen yang digunakan; Pangesti dan Prawoto menitikberatkan pada penyerapan tenaga kerja, sementara penelitian ini menggunakan TPT sebagai indikator ketenagakerjaan, sehingga pendekatan analisis dan implikasi kebijakannya berbeda.

4. Wahyu dan Triani (2023) meneliti pengaruh jumlah hotel terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata pada sembilan destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat. Dengan menggunakan model regresi, penelitian ini menemukan bahwa jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yang menunjukkan bahwa sektor akomodasi memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Temuan ini sejalan dengan argumen dalam penelitian ini bahwa sektor akomodasi memiliki kapasitas tinggi dalam mengurangi pengangguran. Namun, perbedaan muncul pada hasil empiris: dalam konteks Maluku, variabel PDRB sektor akomodasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap TPT, yang dapat disebabkan oleh keterbatasan integrasi sektor akomodasi dengan potensi wisata lokal.
5. Penelitian Busari dkk. (2022) menganalisis hubungan antara pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran di Indonesia dengan menggunakan metode ekonometrika berbasis data nasional. Studi ini menemukan bahwa pertumbuhan penduduk, khususnya pada kelompok usia produktif, dapat menurunkan tingkat pengangguran melalui efek bonus demografi, asalkan didukung oleh penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Penelitian ini relevan dengan studi ini karena sama-sama menemukan pengaruh negatif pertumbuhan penduduk terhadap pengangguran. Namun, penelitian ini berfokus pada tingkat provinsi di Maluku dengan variabel kontrol sektoral, sedangkan Busari et al. menggunakan pan nasional tanpa mempertimbangkan perbedaan struktural wilayah.



6. Sibagariang et al. (2022) meneliti hubungan antara kemiskinan, tingkat pendidikan, dan sektor informal di Indonesia dengan menggunakan data Sakernas dan Susenas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan prediktor positif dan signifikan terhadap proporsi pekerja informal, sementara pendidikan dan upah riil memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap dominasi sektor informal. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mekanisme di mana kelompok miskin tetap bekerja di sektor informal sehingga tidak tercatat sebagai penganggur terbuka. Namun, berbeda dengan hasil penelitian ini yang menemukan hubungan negatif dan tidak signifikan antara persentase penduduk miskin dan TPT, Sibagariang et al. berfokus pada struktur dan karakteristik pekerja informal tanpa mengukur dampaknya langsung terhadap pengangguran terbuka.
7. Penelitian (Bandara, 2024) dan penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan *Location Quotient* (LQ) untuk mengidentifikasi sektor basis dan menganalisis dinamika ketenagakerjaan regional. Bedanya, Bandara menggabungkan LQ dengan *shift-share* untuk memetakan komponen pertumbuhan kerja di wilayah West Virginia, sementara penelitian ini mengombinasikan LQ, DLQ, dan regresi panel untuk menguji pengaruh sektor basis terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Maluku. Selain itu, penelitian ini melibatkan variabel kontrol sosial-demografis, sedangkan Herath lebih menekankan aspek pertumbuhan sektoral antarwilayah.
8. Penelitian Novianto dan Marsisno 2019 dan penelitian ini sama-sama menggunakan data panel dan variabel sektoral untuk menganalisis ketimpangan ketenagakerjaan antarwilayah. Bedanya, Novianto dan Marsisno fokus pada konvergensi produktivitas tenaga kerja antarprovinsi dengan pendekatan spasial, sementara penelitian ini menganalisis pengaruh sektor unggulan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Maluku menggunakan metode LQ, DLQ, dan regresi panel.

2.14 Kerangka Pikir

Kerangka pikir pada penelitian ini merepresentasikan hubungan antara independen, variabel kontrol, dan variabel dependen secara sistematis. independen terdiri dari proporsi PDRB sektor unggulan 1 (X_1), sektor 2 (X_2), dan sektor unggulan 3 (X_3) yang dipilih berdasarkan hasil an Location Quotient (LQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ). LQ



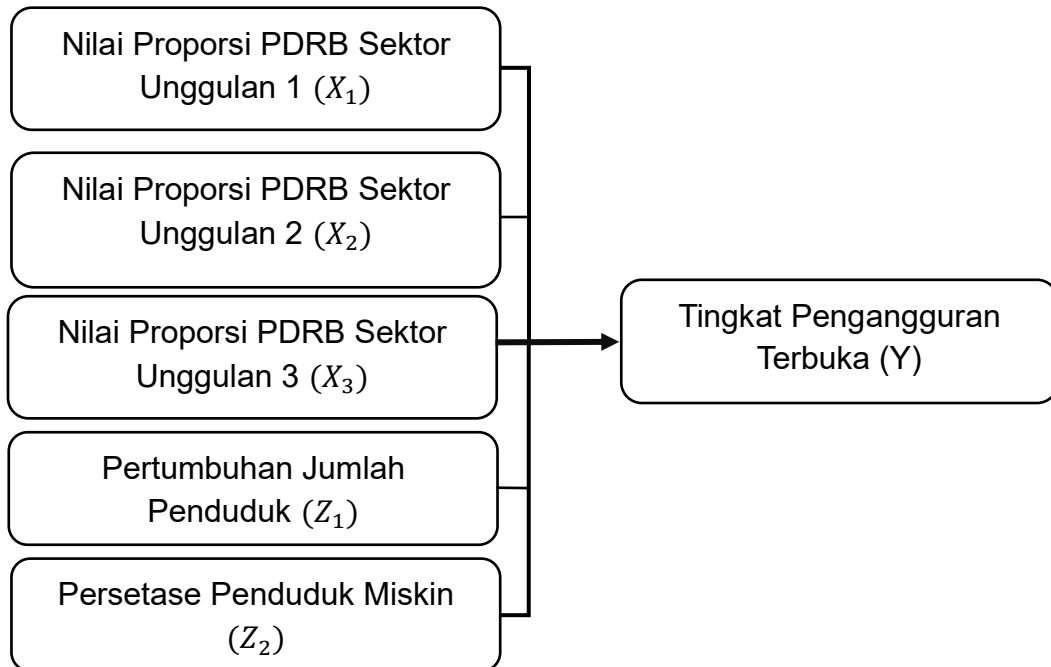
digunakan untuk mengukur keunggulan komparatif suatu sektor dibandingkan rata-rata provinsi, sedangkan DLQ digunakan untuk melihat kecenderungan pertumbuhan sektor tersebut dari waktu ke waktu. Sektor-sektor dengan $LQ > 1$ dan $DLQ > 1$ dikategorikan sebagai sektor unggulan karena dinilai memiliki kontribusi signifikan sekaligus prospek pertumbuhan yang dinamis.

Kerangka ini dibangun berdasarkan asumsi teoritis bahwa semakin besar kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB suatu wilayah, maka semakin tinggi potensinya dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka (Y). Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan dua variabel kontrol, yaitu Pertumbuhan penduduk (Z_1) dan persentase penduduk miskin (Z_2), untuk mengendalikan faktor eksternal yang dapat memengaruhi kondisi ketenagakerjaan. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat meningkatkan penawaran tenaga kerja, sementara tingkat kemiskinan yang tinggi sering kali berkorelasi dengan dominasi pekerjaan informal yang tidak tercatat dalam statistik pengangguran formal.

Pandangan ini sejalan dengan Ismail dan Toh (2020) yang menegaskan bahwa analisis LQ dan DLQ efektif untuk mengidentifikasi sektor basis yang memiliki kontribusi penting bagi pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Lebih lanjut, Allen dan Seaman (2021) menyatakan bahwa kerangka pikir penelitian harus mampu menjelaskan hubungan antar variabel secara logis, sekaligus menjadi jembatan antara teori dan praktik dalam proses analisis data. Ravitch dan Riggan (2016) juga menekankan bahwa kerangka konseptual yang baik berfungsi sebagai landasan epistemologis dan metodologis, memastikan bahwa hubungan antar variabel memiliki dasar teoritis yang kuat. Penelitian ini memvisualisasikan hubungan antara nilai proporsi PDRB dari tiga sektor unggulan terhadap tingkat pengangguran terbuka, dengan mempertimbangkan pengaruh Pertumbuhan penduduk dan persentase penduduk miskin sebagai variabel kontrol.

Dari pemaparan tersebut maka dapat dibuat kerangka pikir penelitian sebagaimana pada Gambar 2 berikut:





Gambar 2. Kerangka Pikir

2.15 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir penelitian pada Gambar 2.1 maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga nilai proporsi PDRB sektor unggulan 1 (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) di Provinsi Maluku.
2. Diduga nilai proporsi PDRB sektor unggulan 2 (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) di Provinsi Maluku.
3. Diduga nilai proporsi PDRB sektor unggulan 3 (X_3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) di Provinsi Maluku.
4. Diduga Pertumbuhan penduduk (Z_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) di Provinsi Maluku.
5. Diduga nilai persentase penduduk miskin (Z_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) di Provinsi Maluku.

